

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi selama ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. (Nasional, Departemen Pendidikan, 2005:1902). Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Menurut *Henry Mintzberg* (1998) pengertian strategi terbagi atas lima definisi, yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi, strategi sebagai taktik dan terakhir strategi sebagai perspektif.

Menurut *Siagian* (2004) memberikan definisi sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Siagian lebih cenderung mengemukakan pendapatnya tentang bisnis.

Stephanie K. Marrus menjelaskan bahwa strategi ialah merupakan suatu proses yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan *Craig & Grant* (1996) yang mengartikan, pengertian strategi sebagai penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Menurut *Jauch dan Gluek* (2003:12) strategi adalah sarana yang digunakan untuk tujuan akhir (sasaran). Tetapi strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi ialah rencana yang disatukan, strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Strategi itu menyeluruh, strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi itu terpadu, semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian.

Menurut *Effendy* (2007:32), mengatakan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Menurut *Chandler* dalam buku *Analisis Swot* (2003:3) menjelaskan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Learned, Christensen, Andrews dan Guth dalam buku Analisis Swot (2003:3) memaparkan bahwa strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.

Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner dalam buku Analisis Swot (2003:4) menjelaskan bahwa strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi. *Porter* dalam buku Analisis Swot (2003:4) memberikan pengertian tentang strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan.

Andrews, Chaffe dalam buku Analisis Swot (2003:4) menjelaskan bahwa strategi ialah kekuatan motivasi untuk stakeholder, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Hamel dan Prahalad dalam buku Analisis Swot (2003:4) memberikan definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi,” bukan dimulai dari “apa yang terjadi.” Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen.

2.1.2 Tahap- Tahapan Strategi

Dalam proses penerapan strategi menggunakan beberapa tahapan diantaranya:

a. Perumusan Strategi

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam menyusun strategi yaitu dengan cara merumuskan strategi atau menyusun langkah awal. Sudah termasuk didalamnya untuk pembangunan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kelemahan dan kelebihan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, mengasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

b. Implementasi Strategi

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi. Tanpa adanya komitmen dan kerjasama dalam pelaksanaan strategi, maka proses formulasi dan analisis strategi hanya akan menjadi impian yang sangat jauh dari kenyataan. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya, perusahaan dan organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dari strategi adalah evaluasi implementasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga macam mendasar untuk mengevaluasi strategi, yakni:

- 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Adanya perubahan yang akan menjadi satu hambatan dalam pencapaian tujuan, begitu pula dengan faktor internal yang diantaranya strategi tidak efektif atau hasil implementasi yang buruk dapat berakibat buruk pula bagi hasil yang akan dicapai.
- 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang akan diharapkan dengan kenyataan). Prosesnya dapat dilakukan dengan menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual atau menyimak kemajuan yang dibuat kearah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan mudah dibuktikan, kriteria yang meramalkan hasil lebih penting dari pada kriteria yang mengungkapkan apa yang terjadi.
- 3) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana. Dalam hal ini tidak harus berarti bahwa strategi yang ada ditinggalkan atau harus merumuskan strategi yang baru. Tindakan

korektif diperuntukan bila tindakan atau hasil tidak sesuai dengan yang dibayangkan semula atau pencapaian yang diharapkan. (David, 2002:3).

2.1.3 Pengertian Manajemen Strategi

Fred R. David menjelaskan dalam bukunya *Manajemen Strategis (Konsep)* (5: 2009) Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana disiratkan oleh definisi ini, manajemen strategi berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran keuangan/akuntansi, produk/operasi, penelitian dan pengembangan serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional.

Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya. Yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut *Pearch* dan *Robinson* (1997) dikatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.

Nawawi berpendapat bahwa manajemen strategi ialah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi) dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan

tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi) dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan jasa serta pelayanan) yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.

Dari penjelasan diatas yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak (bersama-sama) kearah yang sama pula.

2.1.4 Pengertian Analisis SWOT

Menurut *Freddy Rangkuti* (2003:19) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*), dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threaths*).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan acaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkan dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strength*) mampu mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mencegah keuntungan dari peluang (*opportunities*) yang ada. Selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Menurut A. Wijaya Tunggal (2001:74-75) SWOT ialah akronim untuk kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) internal suatu perusahaan dan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan identifikasi yang sistematis dari faktor-faktor ini dan strategi yang menggambarkan pedoman yang terkait antara mereka. Analisis SWOT dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Peluang (*Opportunities*)

Suatu peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan utama adalah salah satu dari peluang. Identifikasi dari segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan-perubahan dan keadaan bersaing, peraturan-peraturan dalam perubahan teknologi, serta hubungan pembeli dan pemasok yang dapat diperbaiki dapat menunjukkan peluang bagi perusahaan.

2. Ancaman (*Threats*)

Suatu ancaman adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman adalah suatu rintangan-rintangan utama bagi posisi perusahaan sekarang atau yang diinginkan dari perusahaan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, daya tawar pembeli dan pemasok utama yang meningkat, perubahan teknologi dan peraturan yang direvisi atau peraturan baru dapat merupakan ancaman bagi perusahaan.

3. Kekuatan (*Strenghts*)

Kekuatan adalah sumberdaya, keterampilan dan keunggulan lain yang relatif terhadap pesaing dan kekuatan dari pasar suatu perusahaan untuk melayani.

4. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan dan kemauan yang secara serius menghalangi kinerja suatu perusahaan.

Menurut *Daft* (2003:314) menjelaskan bahwa analisis SWOT merupakan analisis terhadap empat elemen yang terdiri dari:

1. Kekuatan (*Strenghts*)

Merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategi.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Merupakan karaktersitik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi.

3. Peluang (*Opportunity*)

Merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih dan melampaui sasaran strateginya.

4. Ancaman (*Threats*)

Merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Menurut *Tripomo* dan *Udan* (2005:118) mendefinisikan analisis SWOT adalah penilaian/assessment terhadap identifikasi situasi untuk menemukan apakah suatu kondisi dikatakan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenght*) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan untuk menangani peluang dan ancaman.
2. Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman.
3. Peluang (*Opportunity*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam suatu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.
4. Ancaman (*Threats*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan, dipersulit, terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.

2.1.5 Pengertian Partai Politik

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat yang disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, sekarang ini di negara-negara baru, partai politik sudah menjadi lembaga politik yang bisa dijumpai.

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya yang mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Biasa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern. (Budiardjo, 2008:379).

Mengenai pengertian partai politik cukup banyak sarjana telah mengungkapkan pendapatnya antara lain sebagai berikut: Menurut *Carr* yang dikutip oleh Cangara (2007:208), “*political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government*” (partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).

Sementara itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Republik Indonesia dinyatakan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Menurut *Carl Friedrich* yang dikutip oleh Surbakti (2010:218) dalam bukunya, memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan idiil kepada para anggotanya.

Menurut *Carl J. Friedrich* dalam buku Prof Miriam Budiarjo (1983:161) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

R.H. Soltau dalam buku Prof Miriam Budiarjo (1983:161) berpendapat bahwa partai politik ialah sekelompok warga negara yang sedikit banyak

terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Menurut *Rahman* (2007:102-103) menyimpulkan partai politik sebagai kumpulan orang yang memiliki nilai dan cita-cita yang sama, terorganisir, dan memiliki tujuan yang sama untuk meraih kekuasaan politik dalam pemerintahan negara.

Maka dapat dipahami partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir secara rapi, stabil dan dipersatukan serta dimotivasi dengan ideologi tertentu, berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun.

2.1.6 Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Namun, partai politik juga melaksanakan sejumlah fungsi lain. Fungsi lain tersebut adalah

a. Sosialisasi Politik

Yang dimaksud sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

b. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini sangat besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam sistem politik demokrasi.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

d. Memadu Kepentingan

Untuk memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemaduan kepentingan.

e. Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam sistem demokrasi.

f. Pengendalian Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

g. Kontrol Politik

Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan tolak ukur tersebut sebab tolak ukur itu pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama. (Surbakti, 2010:211).

Menurut UU RI No. 2 Tahun 2008 Pasal 11 partai politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi pemersatu dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan gender.

Sedangkan Menurut Ramlan Surbakti (2005:104) fungsi partai politik adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan secara konstitusional. Ketika melaksanakan fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan itu meliputi seleksi calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif / eksekutif). Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik berperan pula sebagai pembuat keputusan politik.

Tujuan khusus partai politik adalah:

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik pemerintahan.
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat khususnya berdasarkan ideologi tertentu.

Menurut *Ramlan Surbakti* (2006:106) tujuan partai politik adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan kehidupan secara demokrasi berdasarkan UUD 1945.

2.1.7 Pengertian Pemilu

Secara sederhana, pemilihan umum atau pemilu didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dicekam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Dalam buku *Parpol Suatu Tinjauan Umum* (1984:81), disebutkan *Harris G. Warren* dan kawan-kawannya menyatakan bahwa pemilu adalah suatu kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka.

Sudiharto menyatakan bahwa pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi, karena pemilu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara, sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan negara.

2.1.8 Pengertian Pemilu Legislatif

Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil – wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, mandiri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan waktu pemilihannya dilakukan secara serentak diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014.

Pemilihan legilsatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota legislatif.

Pemilihan legislatif tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat karena bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara yang demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu tertentu (*Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1989*). Pemilihan umum langsung dapat disebut praktek politis demokrasi apabila memenuhi beberapa prinsipil, yakni menggunakan asas-asas yang berlaku rekrutmen politik yang terbuka, seperti pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan pemilihan presiden dan wakil persiden yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*Joko J. Prihatmoko, 2005:20*).

Penyelenggaraan pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum yang telah diatur dalam Undang-undang No 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilihan Legislatif adalah Badan Pengawas Pemilu.

Ada beberapa tahap di dalam pemilihan legislatif, diantaranya:

1. Pendaftaran Pemilih

Kegiatan ini bertujuan untuk mendata seluruh calon pemilih yang akan menggunakan haknya dalam pemilu. Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat beberapa hal penting seperti nama lengkap, status perkawinan, tempat tanggal lahir/umur, jenis kelamin dan alamat tempat tinggal.

2. Pendaftaran Peserta Pemilu

Kegiatan ini adalah kegiatan dimana para calon peserta mendaftarkan diri/parpolnya. Untuk administrasi, seluruh parpol mendaftar di departemen kehakiman dan HAM. Sedangkan untuk perorangan mendaftar langsung ke KPU DKI Jakarta.

3. Penetapan Peserta Pemilu

Kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari pendaftaran peserta pemilu. Dalam tahap ini KPU telah melakukan penelitian mendalam tentang persyaratan para calon peserta pemilu. Tahap ini merupakan keputusan akhir KPU yang bersifat final (tidak dapat diganggu gugat) dalam menilai suatu parpol layak mengikuti pemilu. Sedangkan untuk DPD, jumlah peserta tergantung pada daerah pemilihan.

4. Penetapan Jumlah Kursi

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, KPU berwenang untuk menetapkan jumlah dan alokasi kursi untuk masing-masing daerah pemilihan. Baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

5. Pencalonan Anggota DPR, DPRD dan DPD

Pencalonan DPR, DPRD sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing partai politik kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Anggota DPR dilakukan pada KPU, tingkat nasional, sedangkan DPRD pada tingkat provinsi. Khusus untuk DPD, pencalonan dilakukan secara langsung pada kantor KPU tingkat provinsi.

6. Kampanye

Seluruh peserta pemilu, baik partai politik maupun perseorangan yang telah berhak melaksanakan kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kampanye berbentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran informasi kepada khalayak umum dan pemasangan alat peraga di tempat umum dan lain-lain.

7. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Ada beberapa tahapan tata cara proses pemungutan suara diseluruh TPS.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1) Pembukaan tempat pemungutan suara.

2) Pemungutan suara

a) Pemilih mendatangi meja petugas registrasi dan menunjukkan kartu pemilihnya.

- b) Pemilih dapat mengambil kertas suara dan selanjutnya masuk kebilik suara.
- c) Setelah mencoblos, pemilih memasukkan kertas suara yang telah di coblos ke dalam kotak suara.
- d) Setelah memasukkan kertas suara, selanjutnya pemilih meninggalkan lokasi dengan diberikan tanda pengenal yang mana telah memilih di salah satu jari di pintu keluar TPS.

